

GERAKAN ISLAM INDONESIA: JEJAK SEJARAH DAN RESPON PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA 1900-1942

THE INDONESIAN ISLAMIC MOVEMENT: HISTORICAL TRACES AND THE RESPONSE OF THE DUTCH COLONIAL GOVERNMENT 1900-1942

M. Al Qautsar Pratama¹, Roni Ali Rahman¹, Aulya Rahmawati¹
¹(Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia)
aqautsar@gmail.com, roni.alialfatani@gmail.com, aulya99@gmail.com

Abstrak

Gerakan Islam sedikit masih yang mengkaji itupun masih banyak dari golongan sendiri untuk memperkenalkan organisasinya, khususnya dalam pemerintah kolonial dalam kebijakan terhadap Gerakan Islam masih begitu minim untuk ditemukan maka dari itu artikel ini adalah sebagai tambahan referensi penguat dalam akademis sebagai seorang muslim yang bergerak. Dari itulah ditulis jejak gerakan Islam dalam perlawanan terhadap pemerintah kolonial beladan. Tidak hanya itu di bawahnya juga adanya tema yang membahas orientasi gerakan Islam dalam kegiatan perlawanan pada masa itu tentunya dalam sektor pendidikan mulai dari Sarekat Islam (1905), Muhammadiyah (1912), Persatuan Islam (1923), dan Nahdlatul Ulama' (1926) yang menjadi Gerakan Islam paling berpengaruh tentunya dalam wilayah ekonomi dan pendidikan tapi pembahasan kali ini lebih dikonotasikan pada pendidikan tentunya kibat dari sistem pendidikan hari ini dan yang kedua juga ditulis mengenai kebijakan kolonial yang dapat membatasi ruang gerak Islam dalam wilayah Pendidikan dengan berbagai macam kebijakan dari respon perlawanan rakyat pribumi.

Kata Kunci: gerakan, islam, kolonial

Abstract

There are still a few Islamic movements that study them and even then there are still many from their own groups to introduce their organizations, especially in the colonial government in policies against Islamic movements that are still so minimal to be found, therefore this article is an additional reinforcement reference in academia as a Muslim who moves. From that written traces of the Islamic movement in resistance to the Dutch colonial government. Not only that, under him there was also a theme that discussed the orientation of the Islamic movement in resistance activities at that time, of course in the education sector starting from Sarekat Islam (1905), Muhammadiyah (1912), Islamic Association (1923), and Nahdlatul Ulama' (1926) which became the most influential Islamic movement, of course, in the area of economics and education, but the discussion this time is more connoted with education, of course, the focus of today's education system and the second is also written about colonial policies that can limit the movement of Islam in the area of education with various policies from the response of people's resistance indigenous.

Keyword: islamic, movement, colonial

PENDAHULUAN

Sejarah membuktikan bahwa hingga saat ini, Islam tetap tegak dengan ajarannya yang utuh dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Arab menjadi pusat arah bagi umat Islam di seluruh dunia sebagai simbolisasi keislaman. Oleh karena itu, Islam selalu memainkan peran penting

dalam kehidupan manusia, terlibat dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Banyak tokoh Islam telah memberikan kontribusi pemikiran mereka untuk kemajuan Islam, meskipun eksistensinya sempat meredup pada beberapa periode sejarah. Islam kini kembali menunjukkan keberadaannya melalui gerakan-gerakan Islam yang muncul sebagai gerakan reformis di dunia. Hasan Hanafi, sebagai seorang tokoh pelawan dan sosiolog, melawan orientalis untuk membimbing umat Islam dalam perlawanan terhadap pengaruh barat dalam bidang budaya dan kultur di suatu negara. Namun, di sisi lain, umat Islam terkadang terjebak pada hal-hal yang bersifat non-postmodern, sehingga gerakan Islam yang signifikan tidak selalu diakui oleh sebagian umat Muslim lainnya. Fenomena pengkafiran antar sesama Muslim sering terjadi dalam interpretasi Al-Qur'an untuk mencari kebenaran (Mastuhu, 1994).

Sebelum kedatangan penjajah Belanda ke wilayah Indonesia selama Perang Dunia Kedua, Islam sudah berdiri dengan kokoh dan telah meresap secara luas di kalangan umat Muslim. Sehingga, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Tidak mengherankan jika Islam juga memberikan kontribusi besar dalam menciptakan tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi pahlawan Islam yang luar biasa (Mastuhu, 1994). Belanda, sebagai kolonial yang masuk ke wilayah tersebut, juga hadir dalam konteks kekuasaan. Nurcholis Madjid menyatakan bahwa jika Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda, salah satu sistem negara di Indonesia kemungkinan besar akan mengikuti Islam, terutama dalam bidang pendidikan. Pernyataan ini mencerminkan pengaruh dan dominasi Islam di Indonesia (Mochtar, 2009).

Gambarkan secara konkret, sistem pendidikan di wilayah Indonesia yang menjadi jajahan Belanda dapat dianalogikan dengan membandingkan "pondok pesantren" di Indonesia dengan institusi "*Boarding School*" di Amerika. Tebuireng, sebagai contoh pondok pesantren di Indonesia, menciptakan apa yang sekarang dilihat oleh orang Indonesia, sementara "*Boarding School*" di Amerika, seperti Harvard, telah menjadi universitas paling bergengsi dan pelopor dalam pengembangan ilmu dan gagasan mutakhir. Di Indonesia, peran "Harvard" tersebut dijalankan oleh universitas umum yang sebagian besar merupakan kelanjutan dari lembaga pendidikan masa kolonial.

Perlawanan umat Islam terhadap kedatangan penjajah Belanda sangat terlihat dalam sejarah perlawanan mereka terhadap penjajahan tersebut. Sosialisasi Islam di Indonesia sejak

abad ke-16 menunjukkan bahwa pondok pesantren selalu memilih posisi yang tidak pernah netral dalam setiap proses sejarah dan perjuangan bangsa. Ini menggambarkan bahwa sejarah Islam di Indonesia adalah cerita perluasan peradaban dan pengaruhnya terhadap kehidupan keagamaan, sosial, dan politik di Indonesia (Mochtar, 2009).

Pergulatan ini menciptakan semangat perjuangan dalam masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, yang ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gerakan Islam, yang pertama kali muncul dalam bidang pendidikan di pondok pesantren, juga turut ambil bagian dalam politik melawan penjajah Belanda, seperti Sarekat Islam (1905), Muhammadiyah (1912), Persatuan Islam (1923), dan Nahdlatul Ulama' (1926). Ini menunjukkan bahwa Belanda sebagai penjajah juga tidak tinggal diam terhadap gerakan-gerakan tersebut. Sebagai otoritas teratas, Belanda memberikan tekanan perang untuk menyempitkan ruang gerak rakyat Islam, serta menindas Islam dalam upayanya untuk mengatasi gerakan-gerakan tersebut. Pemerintah Belanda bahkan mengakui hukum Sarekat Islam sebagai organisasi lokal.

Cabang Sarekat Islam (SI) di suatu wilayah harus didirikan agar tidak mudah diinfiltrasi oleh pihak yang bermaksud merusak SI. Kebijakan pemerintah Belanda yang membongkar SI mendorong anggotanya untuk membentuk Sarekat Tengah (CSI) sebagai organisasi utama yang mengayomi cabang-cabang SI di berbagai wilayah. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan organisasi itu sendiri. Namun, rencana pembentukan CSI menemui kendala saat kongres SI di Yogyakarta pada tanggal 18-20 April tidak dapat mencapai kesepakatan terkait kepemimpinan CSI karena adanya perselisihan mengenai kepemimpinan SI (Ali Maschan, 2007). Muhammadiyah, yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, juga memegang peranan penting dalam gerakan pendidikan. Gerakan ini memberikan arah dan pendidikan agama maupun umum, membuka pintu bagi perlawanan terhadap penjajah. Meskipun Muhammadiyah tidak pernah bubar dan terus berkembang hingga kini, gerakan ini melibatkan diri dalam pendidikan politik untuk melawan penjajah baru yang menggunakan pemikiran dan teknologi, yang merugikan kedaulatan Indonesia. Wilayah Yogyakarta menjadi pusat geografis gerakan Muhammadiyah yang terus berkembang hingga saat ini (Ali Maschan, 2007).

Sistem pendidikan dengan orientasi Islam yang dibangun oleh Muhammadiyah menyebabkan Islam sendiri terkadang terperangkap dalam ruang gerak doktrinasi. Gerakan

pemuda Muhammadiyah terbatas pada wilayah Yogyakarta, dan untuk melampaui batasan itu, diperlukan perlawanan dan cita-cita, mengingat kekuatan penjajah saat itu sulit diatasi meskipun sudah digoyahkan oleh Sarekat Islam. Meskipun demikian, semangat Ahmad Dahlan terus berkobar untuk membangun dan menyebarkan ilmu pengetahuan guna memerdekakan Nusantara dalam suatu sistem yang tidak lagi terkekang (Ali Maschan, 2007).

Gerakan Islam tidak hanya terbatas pada lingkup institusi politik, tetapi juga melibatkan pemuda Islam dalam membangun gerakan-gerakan kecil yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah untuk melawan ancaman di bidang ekonomi, politik, dan lainnya. Gerakan ini, seperti Nahdlatul Wathan, Tashwirul Afkar, dan Nahdlatul Tujjar, merespons hadirnya penjajah kolonial yang semakin mengekang. Kiai Wahab Hasbullah, sebagai aktivis Islam, menjadi penggerak dalam bidang ilmu pengetahuan, dan dalam perjuangan Indonesia, Kiai Wahab bersama Kiai Hasyim dan Kiai Bisri mendirikan Nahdlatul Ulama' (NU). Meskipun NU muncul setelah Persis, tetapi memberikan pengaruh besar dalam politik Islam di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur. Pesantren tua di Jawa Timur dikonotasikan dekat dengan pabrik-pabrik yang dibangun Belanda, hal ini merupakan strategi mata-mata rakyat dalam pemberontakan dan mengubah arah ekonomi di Nusantara (Ali Maschan, 2007).

Perjalanan politik praktis pada masa itu berlanjut dengan diizinkan gerakan Islam di Nusantara sebelum kemerdekaan, membuat gerakan ini menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial. Oleh karena itu, gerakan ini dibatasi wilayah perlawanannya dan sering kali terlibat dalam pembunuhan terhadap penjajah melalui gerakan Islam. Belanda terkadang lengah dalam menghadapi gerakan ini. Sebagai contoh, pesantren yang dikaitkan dengan NU harus menggunakan bahasa Arab saat berbicara, sehingga sulit bagi Belanda untuk menemukan siasat yang dibangun dan dijaga di wilayah pesantren. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang sebagai bahan pembelajaran untuk memberikan perspektif baru dalam penelitian (Bruinessen, 1999).

Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi budaya yang dogmatis tetapi juga menjadi budaya pembebasan. Kajian ini akan difokuskan pada peran gerakan Islam yang berusaha mengembalikan marwah Nusantara tidak hanya sebagai budaya tetapi sebagai kebebasan Islam, yang pada gilirannya menciptakan simbol kebebasan demokrasi yang kita kenal saat ini.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan, yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Sulasman, 2014). Tahapan pertama yaitu heuristik (pengumpulan sumber). Pada tahap ini, penulis menghimpun sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik pembahasan (*Library Research*). Adapun sumber primer berupa arsip jejak Soetomo di Perpustakaan, Staatsblad 1932 No. 494 tentang *Wilde Scholen Ordonantie*, Staatsblad tentang *Toezicht Ordonnantie Particulier Onderwijs*. Sedangkan sumber sekunder menggunakan beberapa buku sumber, artikel, jurnal dan koran.

Tahapan kedua yaitu verifikasi (kritik sumber). Pada tahapan ini, penulis menyeleksi, menguji kredibilitas sumber yang telah diperoleh agar menjadi sebuah fakta sejarah. Tahapan ketiga yaitu interpretasi Pada tahapan ini penulis melakukan penafsiran untuk menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang telah diverifikasi. Tahapan terakhir yaitu historiografi (penulisan). Pada tahapan ini penulis menyajikan hasil sintesis yang diperoleh (Daliman, 2018). Berdasarkan dari metode dan langkah tersebut akan didapat pembahasan seperti di bawah ini.

PEMBAHASAN

Empat Gerakan Islam Yang Masif Pada Masa Pemerintah Kolonial 1900- 1942

1. Sarekat Islam

Sarekat Islam merupakan gerakan tertua dalam wilayah penelitian ini. Gerakan ini hadir pada 16 Oktober 1905. Gerakan ini lahir dalam paradigma politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap rakyat yang ada di Indonesia namun sebaliknya pemuda juga melakukan politik etis yang dipegang langsung dalam wilayah publik Nusantara untuk menculik dan membunuh satu demi satu prajurit penjajah. Namun sarekat Islam ini bukanlah gerakan yang hidup untuk memerankan terjadinya perang politik namun sarekat Islam ini adalah respon dari para saudagar yang hadir di Nusantara yang kebanyakan masyarakat Tionghoa. Sebab begitu respon ini dilakukan melalui perdagangan Nusantara yang berhasil menyaingi para pedagang-pedagang yang hidup dari luas. Gerakan ini lahir bukan dalam wilayah politik dan tidak mau disebut sebagai gerakan politik akan tetapi gerakan ini fokus pada wilayah ekonomi yang meluaskan sayapnya hingga hampir di seluruh penjuru Nusantara.

Orientasinya bukan memegang kendali politik melainkan lajur ekonomi yang demi sedikit masyarakat pribumi kehilangan eksisnya dalam pergulatan perdagangan di antara para saudagar melawan saudagar china. Maka dari, itu tujuan Sarekat Islam adalah bergerak melalui kemerdekaan ekonomi baik dari china dan Belanda. Pertama, mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi, yaitu membangun mindset yang eksis dalam berdagang terhadap pemuda yang tidak terlalu minat menjadi pebisnis dan masyarakat Nusantara yang sudah menyerah terhadap mental pekerja (*ploretal*). Kedua, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi, dalam wacana menyadari bahwa Nusantara dalam kekangan yang sudah diambang adanya penjajahan Belanda ke-Indonesia dan juga membangun jiwa ekonomi yang sistematis. Ketiga, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, Selain sebagai gerakan ekonomi juga melakukan dakwah Islam pada masyarakat Islam guna memperbaiki citra Islam. Keempat, membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi, saling bersinergi dalam membentuk Islam yang berdaulat untuk saling memberikan sinergis terhadap anggota yang terhimpit ekonomi untuk memajukan ekonomi. Terakhir Mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia, terakhir sebagaimana diatas yaitu hanya demi melakukan perbaikan nama dan juga memberikan kemakmuran ekonomi dari citra Islam yang terbangun berabat-abat (Bruinessen, 1999).

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah lahir sebagai respons terhadap kondisi sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Salah satu tujuan utama Muhammadiyah adalah untuk memperbaiki kondisi masyarakat Islam, baik dari segi agama, sosial, maupun ekonomi, serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.

Orientasi lahirnya Muhammadiyah pada 1912 dalam melawan kolonial terlihat dari beberapa tindakan dan kebijakan yang diambil oleh organisasi ini, antara lain: Penolakan terhadap budaya Kolonial Muhammadiyah menolak budaya kolonial yang dianggap merusak nilai-nilai agama dan adat istiadat Indonesia. Muhammadiyah

mengambil langkah untuk memperkuat identitas Islam dan adat istiadat Indonesia, serta mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Pendidikan sebagai senjata Melawan Kolonialisme Muhammadiyah memperjuangkan pendidikan yang memadai bagi masyarakat Islam, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka. Pendidikan dianggap sebagai senjata melawan kolonialisme, karena dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan kemandirian. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Muhammadiyah juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi dan usaha mikro, sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan tidak tergantung pada pemilik modal asing.

Gerakan kemerdekaan Muhammadiyah mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia dan menjadi bagian dari perjuangan nasional melawan kolonialisme. Muhammadiyah mengadakan berbagai kegiatan dan aksi yang bertujuan untuk menguatkan semangat nasionalisme, seperti penggalangan dana untuk kemerdekaan, perlawanan terhadap kebijakan kolonial yang merugikan masyarakat, dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia (Noer Deliar, 1996). Sumber referensi yang dapat dijadikan acuan untuk informasi ini antara lain buku "Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values" oleh Carool Kersten dan buku "Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation" oleh Howard M. Federspiel (Bruinessen, 1999).

3. Persis (Persatuan Islam)

Persatuan Islam (Persis) adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1923 di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Tujuan utama Persis pada awalnya adalah untuk membela dan memperjuangkan agama Islam serta menolak kolonialisme dan kekuasaan asing di Indonesia. Namun, orientasi Persis kemudian berkembang menjadi lebih radikal dan lebih terfokus pada kegiatan keagamaan.

Persis berusaha memperkuat identitas Islam dan menekankan pentingnya mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi ini juga menolak

pengaruh Barat dan merangsang kesadaran nasionalisme dalam masyarakat Islam Indonesia. Pada masa kolonial, Persis juga aktif dalam memperjuangkan pendidikan Islam, termasuk mendirikan sekolah-sekolah Islam dan mempromosikan ajaran Islam yang dipahami secara murni dan autentik. Namun, pada akhirnya Persis tidak berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara langsung dan lebih fokus pada kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Setelah Indonesia merdeka, Persis masih aktif dan menjadi salah satu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia hingga saat ini (Nasution, 2001).

Tujuan tersebut mencakup beberapa hal seperti: Menolak kolonialisme: Persis didirikan pada saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu, salah satu tujuannya adalah menolak kekuasaan asing dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

1. Menegakkan nilai-nilai Islam: Persis berupaya untuk memperkuat identitas Islam di Indonesia dan menekankan pentingnya mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengembangkan pendidikan Islam: Persis merasa bahwa pendidikan merupakan kunci untuk memperkuat identitas dan kebudayaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah Islam dan mempromosikan ajaran Islam yang dipahami secara murni dan autentik.
3. Mempromosikan nasionalisme: Persis juga merangsang kesadaran nasionalisme dalam masyarakat Islam Indonesia.

Organisasi ini berupaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjuangan melawan kolonialisme. Menolak pengaruh Barat: Persis menolak pengaruh Barat yang dianggap sebagai ancaman bagi kebudayaan dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, organisasi ini berupaya untuk mempertahankan identitas dan kebudayaan Islam yang murni dan autentik di Indonesia. Secara keseluruhan, tujuan Persis pada saat didirikan adalah untuk memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Indonesia, memperkuat identitas dan kebudayaan Islam, serta mengembangkan pendidikan Islam dan nasionalisme di Indonesia (Bruinessen, 1999).

4. Nahdlatul Ulama'

NU atau Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan Islam yang didirikan di Indonesia pada tahun 1926, pada masa kolonial Belanda. Pada awalnya, NU dibentuk sebagai sebuah gerakan reformasi Islam yang bertujuan untuk mengembalikan ajaran agama Islam kepada ajaran yang murni dan menghindari pengaruh-pengaruh asing yang dianggap merusak nilai-nilai agama. Dalam konteks kolonialisme, NU memiliki orientasi yang cukup khas dan berbeda dengan organisasi-organisasi Islam lainnya.

NU tidak hanya memperjuangkan kepentingan umat Islam dari segi keagamaan, tetapi juga dalam hal sosial, ekonomi, dan politik. NU juga menolak penjajahan dan mencoba mengembangkan nilai-nilai keIslaman yang bisa menjadi landasan bagi perjuangan melawan penjajahan. Meskipun demikian, NU pada masa kolonial juga mengalami berbagai tantangan, seperti perlakuan diskriminatif dari pemerintah kolonial Belanda dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan kolonial. Beberapa tokoh NU pada saat itu bahkan dipenjara atau diasingkan karena dianggap membahayakan keamanan kolonial. Dalam hal pendirian pada masa kolonial, NU menempuh jalur yang relatif moderat dan cenderung memilih pendekatan kooperatif dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. NU mengambil sikap menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah kolonial, namun tetap memperjuangkan kepentingan umat Islam dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara bertahap melalui jalur politik dan pendidikan.

Pada akhirnya, NU memainkan peran yang cukup signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu kekuatan politik Islam yang penting dalam membangun negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Orientasi NU pada masa kolonial ini tetap menjadi pijakan bagi organisasi ini dalam mengembangkan gagasan-gagasan keagamaan dan sosialnya di masa-masa selanjutnya. Beberapa tujuan pendirian NU yang terkait dengan konteks kolonial Belanda antara lain: Mengembangkan dan memperkuat pemahaman agama Islam yang murni dan terbebas dari pengaruh asing yang dianggap merusak nilai-nilai agama, meningkatkan kemampuan umat Islam untuk menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi pada masa itu, seperti

kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakmerataan, memperjuangkan hak-hak dan kepentingan umat Islam di tengah kondisi penjajahan, termasuk hak-hak politik, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, menjalin hubungan yang harmonis dan toleran antara umat Islam dengan umat agama lainnya, serta memperkuat kerukunan dan persatuan nasional.

Dalam perkembangannya, NU juga menambahkan tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan peran NU sebagai organisasi Islam yang moderat dan inklusif di Indonesia, seperti memperkuat pendidikan Islam, mengembangkan ekonomi umat, dan mempromosikan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU telah memainkan peran penting dalam mengembangkan pemikiran Islam yang inklusif dan moderat, serta memperjuangkan kepentingan umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum. NU juga menjadi salah satu kekuatan politik dan sosial yang signifikan dalam membangun negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (Bruinessen, 1999).

Pendidikan dan Gerakan Islam di Tengah Kolonialisme Belanda

Gerakan Islam secara menyeluruh adalah gerakan untuk mempertahankan agama Islam agar tidak terpengaruh atau terkontaminasi kolonialisme atau ajaran yang dibawa penjajah. Sehingga gerakan diatas dalam mewujudkan hal ini sangat begitu radikal dan proporsional sebab gerakan ini akan selalu menjamin Islam dan Nusantara di masa depan. Dari itulah gerakan Islam juga berbasis pesantren sebagai gerakan tertua atau sebagai institusi pendidikan tertua di Indonesia. Nur Cholis Majid pernah berkata:

“seandainya Indonesia tidak dijajah maka sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti sistem pendidikan pesantren”.

Gerakan secara menyeluruh dalam mengmbakan pendidikan Islam ditengah-tengah adidaya pemerintah kolonialisme hanya pesantren yang menjadi satu-satunya gerakan yang mengembangkan pendidikan keislaman dan menanamkan bibit-bibit patriotisme serta menentang kolonialisme secara konsisten. Pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis Islam dapat

menjadi “pusat pelatihan” dan “pusat kebudayaan” gerakan pesantrenan ini dilembagakan oleh para kaum muslimin yang pada kenyataannya tidak dapat disangkal oleh Belanda sebagai penjajah (Arifin: 104). Ziemek (1986:56-58) menyatakan melalui penelitian yang ia lakukan bahwa gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda secara *de facto* dalam sejarah berasal dari kiai-kiai dan pesantren sebagai basis perjuangannya (Ahmad Baso, 2012).

Gerakan perlawanan pesantren dalam menghadapi pemerintah kolonial dilakukan dengan tujuan menjaga identitas cultural-religio dari kecaman kolonialisme Belanda dalam bentuk sistem pendidikan sekuler dan invasi militer serta ekonomi yang dibawa. Bagi Mahmud Arif (2008:177) perlawanan pesantren muncul secara tersembunyi dan terbuka. Dalam disertasinya (yang berjudul pendidikan Islam transformatif) menjelaskan lebih detail bahwa perlawanan tersembunyi dilakukan dengan sikap konservatif, defensif dan isolasionis, sedang perlawanan terbuka dilakukan dengan sikap non-kooperatif dan kobaran semangat menolak penjajah. Gerakan ini dilakukan untuk defensif gerakan adidaya barat yang mendiskriminatif Belanda pada negara jajahannya terutama umat Islam. Semangat perlawanan dalam menyambut kemerdekaan ini terus tertumpah di seluruh penjuru Nusantara dan terlibat langsung dalam perlawanan melawan penjajah secara terbuka sehingga dari sini membentuk kesadaran “protonasionalisme” yang diorientasikan pada terbentuknya cinta nasionalisme dalam kalangan kaum sarungan menjadi *vis a vis* sehingga mampu mengubah gerakan pesantren yang orientasinya sebagai lembaga pesantren berubah menjadi *center of anti-dutch sentiment* (Ahmad Baso, 2012).

Masuk pada masa 1930 dimana itu sebagai puncak dari penjajahan kolonialisme terhadap Nusantara yang mulai lahir gerakan-gerakan perlawanan terhadap Belanda. Dan masa itu juga dikenal sebagai pergerakan politik praktis. Golongan nasionalis yang orientasinya dilahirkan oleh gerakan Budi Utomo yang termasuk kader-kader barat kembali kepada tujuan awalnya yaitu pendidikan dan kembali merangkul pesantren untuk mengikuti arah pendidikan yang dilakukan barat. Gerakan ini sebagai bukti masih adanya Belanda dalam melakukan perlawanan terhadap Indonesia yang mulai mendominasi dari arah pesantren.

Kader Budi Utomo bergerak untuk melanjutkan pendidikan modern dalam membentuk dan menjemput kemerdekaan namun hal ini ditolak oleh Soetomo bahwa hal ini merupakan inovasi pendidikan yang dicoba oleh Belanda yang mayoritas kader Budi Utomo adalah mayoritas

pro-kolonial (Ahmad Baso: 2012:41). Dan Soetomo begitu gigih mempublikasikan pesantren dan menghargainya bahkan dirinya menilai bahwa pesantren melebihi kinerja sitasi dari sekolah modern. Menurutnya, pesantren tidak hanya menyelami kitab masa lalu akan tetapi juga memberi peran dimasa kini dan yang akan mendatang. dari sini gejolak politik praktis dalam pemetaan secara agraris namun karena masih dalam kondisi dibawah tekanan Belanda pesantren melanjutkan gejolak politik praktisnya setelah kemerdekaan sampai hari ini masih menjadi masalah besar dan terus bertumpah pikiran saling salah menyalahkan. Walau banyak keberatan dari organisasi Budi Utomo.

Secara kontras, Soetomo dalam membandingkan dan melihat kekurangan serta kelebihan dari sistem pendidikan antara pesantren dan barat maka jatuhlah keputusan bahwa pendidikan pesantren yang lebih relevan. Setelah itu, ditahun yang sama kisaran 1930 dengan tentang keputusan soetomo tersebut terjadi polemik cultural. Perdebatan ini begitu menarik jika ditarik dalam perebutan masa depan bangsa dimana harus menggunakan sistem koloni atau pesantren. Sementara orang-orang yang pro koloni selalu menyuarakan opini mengenai kelemahan pesantren dan juga menilai bahwa cultur Nusantara yang ada sudah di pangku oleh muslim dan tidak murni lagi maka dari itu dengan instrumen itu orang orang pro koloni terus menyerang dengan berbagai media untuk memberhentikan gerakan yang dibangun pesantren. Di belakang layar Ali Maschan Moesa (2007: 113) menyatakan bahwa gerakan pro-kolonial adalah hasil doktrinisasi dari Belanda dan kemudian banyak dari gerakan ini adalah kader-kader masa depan Belanda dari rakyat pribumi. Akan tetapi, sikap itu direspon oleh pendiri Budi Utomo dalam cultural yang kala itu mayoritas muslim bahwa media tersebut adalah isu yang dibuat koloni untuk kita kembali dijajah. Dan terus berlanjut dari gerakan pesantren atau rakyat pribumi berperang dengan daging sendiri melalui adu domba tersebut. Beberapa yang pro pesantren yaitu Soetomo, Ki Hadjar Dewantara a, dr. Wahidin Soedirohoesodo, dan Sutopo Hadi Seputro. Sedangkan mereka yang kontra pesantren antara lain ialah Sutan Takdir Alisyahbana, Gunawan Mangunkusumo, dan Noto Soeroto (Graaf, 1989).

Sedangkan orang-orang nasionalis yang pro-pesantren selalu bergerak dan belajar dari pesantren yang mampu menolak imperials yang dilakukan Belanda dan juga orang-orang nasionalis berlindung dari kejaran polisi Belanda di balik tembok pesantren. Pro-koloni

menggunakan Belanda sebagai benteng dan terus menghembus gerakan soetomo. Namun walaupun begitu gerakan pesantren dalam hal ini yang berimbas pada prinsip radikalnya sehingga dapat disegani kolonial juga memiliki konsekuensi yang merugikan namun disisi lain juga menguntungkan.

Kadang-kadang sikap radikal ini membawa kerugian bagi dunia pesantren. Mereka tidak ikut menikmati kultur yang didatangkan kaum penjajah. Orang lain pandai berbahasa Belanda sedang Sebagian besar kaum santri tidak. Orang dapat mengambil manfaat dari peradaban yang datang menyertai penjajahan, kaum santri apriori menolaknya. Berhubungan dengan itu, banyak dikalangan bangsa kita sendiri yang mencemoohkan sikap pesantren ini. Padahal sikap yang diambil dunia pesantren mempunyai latar belakang untuk keselamatan kebudayaan santri kita, dan untuk membendung pengaruh kolonial belanda yang tujuannya bukan saja mencapai keuntungan kultur mereka, tetapi juga politik dan ekonomi mereka.

Pengaruh ini dijelaskan oleh Van Bruisen bahwa banyak pemimpin kiai maka dari itu gerakan panjang umat muslim diwadahi oleh pesantren dan pendidikannya. Sehingga menurutnya pesantren lah yang membentuk peradaban pendidikan sampai hari ini walaupun dunia agama di Indonesia mulai dihilangkan. Acap kali Bruisen menegaskan kaum-kaum fanatic Islam juga memberi sebuah konsekuensi kemerdekaan yang dapat menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dari itu walau tetap hadir *Islamophobia* sebagai tindakan barat untuk meminggirkan kekuasaan Islam yang pernah dimiliki. Maka dari itu, Indonesia hari ini masih dalam propaganda penjajahan secara intelektual yang terpaksa terhadap pekerjaan dan tidak memberanikan liar secara bebas bahwa agama sebagai instrumen kebenaran. Maka dari itu, bagi Haji Misbach kita akan terus bertempur untuk menemukan identitas Islam sebagai penggagas kebenaran malah bukan sebagai penikmat kebenaran.

Analisis Kebijakan Pemerintah Kolonial Dalam Menghadapi Gerakan Islam

Kebijakan ini coba penulis analisa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap respon secara spesifik Belanda tidak langsung mengeluarkan hukum secara kasar dan frontal akan tetapi melalui cara plesatan untuk menjatuhkan Islam dikit demi sedikit sehingga gerakan itu mati sebab ditulis oleh Snouck Hurgronje jika Belanda langsung secara frontal memberi ketegasan maka kaum muslim akan segera secara anarkis mengbackup hal itu.

Kegiatan ini difungsikan agar dari kebijakan itu gerakan muslim dapat mematuhi. Kebijakan ini tidak dapat dikomunikasikan secara intes oleh pihak kolonial sebab tujuan kolonial adalah menghatam habis dan menguras habis kekayaan Nusantara sedangkan di pihak lain rakyat memerlukan kebebasan dan rasa kepemilikan kekayaan harus ditingkatkan dan hal ini muncul dari umat muslim pada kala itu. Sebab jika tidak dibendung kita akan terus dipenjara oleh kerakusan kolonial. Dibawah ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Kebijakan:

1. *Cultuurstelsel* pada tahun 1830-an, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan *Cultuurstelsel* yang bertujuan untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam Hindia Belanda. Kebijakan ini juga berdampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Hindia Belanda, termasuk dalam hal agama. Pemerintah kolonial memberikan dukungan finansial kepada pemimpin-pemimpin agama yang setia kepada pemerintah, sementara mereka yang tidak setuju dengan kebijakan kolonial diberi hukuman.
2. Kebijakan Etis Pada tahun 1901, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan etis yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat di Hindia Belanda. Kebijakan ini juga mencakup penguatan pendidikan dan kesehatan. Dalam hal agama, kebijakan ini mengakui hak masyarakat untuk memeluk agama apapun dan membangun tempat ibadah. Namun, pemerintah tetap memantau aktivitas keagamaan dan menempatkan beberapa pembatasan, seperti melarang penggunaan pengeras suara untuk adzan di masjid.
3. Kebijakan Konservatif pada tahun 1930-an, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan konservatif terhadap gerakan Islam yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan kolonial. Pemerintah membatasi aktivitas organisasi Islam dan melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh gerakan Islam yang dianggap radikal. Hal ini memicu perlawanan dan aksi demonstrasi dari umat Islam di Hindia Belanda. Pendirian Madrasah dan pendidikan Islam Pada periode ini, pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan madrasah dan memberikan dukungan finansial untuk pendidikan Islam. Meskipun tujuannya adalah untuk memperkuat keberadaan kolonial Belanda di Hindia Belanda, kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Muslim untuk mendapatkan pendidikan agama.

Secara umum kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial sangat bervariasi, begitu juga dengan tiga kebijakan diatas. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kolonial adalah kebijakan yang memiliki acuan kepentingan Belanda sebagai negara adidaya kala itu. Setiap kebijakan yang keluar maka ada masalah yang terjadi atas kuasa Belanda di Indonesia. Namun ada juga istilah ordonansi guru yang secara tertulis dilakukan oleh pemerintah daerah kala itu dibawah adidaya Belanda. Seperti misalnya salah satu cara yang dipergunakan oleh pihak Belanda untuk mengawasi Islam di Indonesia, terutama di Jawa, ialah peraturan yang dikeluarkan dalam tahun 1905 tentang pendidikan Islam. Peraturan tersebut mengharuskan izin tertulis dari bupati atau pejabat yang sama kedudukannya tentang pendidikan agama Islam. Izin ini mengemukakan secara terperinci sifat dari pendidikan itu. Tambahan lagi guru agama bersangkutan harus membuat daftar dari murid muridnya menurut bentuk tertentu yang harus dikirimkan secara periodik kepada kepala daerah bersangkutan. Bupati atau pejabat yang sama kedudukannya hendaklah mengawasi dan mengecek apakah guru agama tersebut bertindak sesuai dengan izin yang diberikan. Pejabat ini juga harus mengawasi anak-anak murid dimaksud yang berasal dari luar daerah guru tadi.

Kebijakan ini juga sebuah batasan terhadap kaum Islam Nusantara untuk membatasi gerakan yang dilakukan oleh umat Islam sehingga guru muslim atau agama standar pengajarannya terkontrol oleh pihak kolonial. Sehingga umat Islam menganggap hal ini sebagai diskriminatif terhadap umat muslim. Dengan kebiasaan sekolah pesantren yang utamanya adalah santri lokal yang secara administratif tidak tercatat kemudian harus tercatat secara rapi hal ini menyebabkan pergolakan baru dari umat muslim terhadap pemerintah kolonial. Maka dari itu kolonial tidak semerta merta mendinginkan gerakan yang terjadi dari golongan ortodok maupun reformis Islam tapi Belanda mengeluarkan kembali undang-undang secara tertulis yaitu pada 1932, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan tentang pengawasan terhadap sekolah swasta (*Toezicht Ordonnantie Particulier Onderwijs*) lewat Staatsblad 1932 No. 494 yang lebih populer dengan ordonansi sekolah liar (*Wilde Scholen Ordonantie*). Peraturan itu menetapkan bahwa para guru yang akan mengajar di sekolah swasta yang bersubsidi maka harus meminta izin kepada pegawai distrik setempat. Pelamar harus alumni dari sekolah pemerintah

atau sekolah swasta bersubsidi dan tidak akan mengganggu ketenangan dan ketertiban pemerintah kolonial. Ordonansi ini juga dimaksudkan untuk mencegah pengaruh politik pada sekolah-sekolah swasta yang disebut “sekolah liar” (Putuhena, 2007: 270).

Putusan ini adalah keresahan pemerintah kolonial terhadap gerakan Islam yang mulai melajur dari berbagai bilik pendidikan. Pesantren dianggap sebagai sekolah swasta yang secara tidak langsung beralih pada kondisi bahwa pesantren atau sekolah swasta adalah ilegal. Dengan pengecualian masyarakat pribumi harus sekolah pada sekolah yang sudah disediakan pemerintah. Keadaan ini terus membawa kontroversi diskriminatif terhadap muslim yang mulai menyempit arah gerakannya. Walau pendidikan pesantren atau yang swasta telah berdiri lama sebelum datangnya Belanda kian mulai diusir kekuasaannya. Sehingga pemanfaatan ini juga bergabung dengan pengkondisian masyarakat yang dikenal dengan priyayi yaitu keturunan elit atau pemilik kekuasaan. Dari itu muslim semakin menggambarkan bahwa pendidikan anti Islam itu harus segera diperangi dengan cara apapun sebab dengan statement awal Belanda mengenai netral agama hanya sebagai topeng agar Belanda dapat diterima di mayoritas muslim. Nyatanya kolonial kala itu lebih berpihak terhadap agama kristen dan model pendidikannya yang liberal (Bruinessen, 1999).

Dari inilah menurut Snouck Hurgronje Belanda mmemilah menjadi tiga kategori mengenai Islam yaitu Islam dalam peribadatan, Islam dalam kemasyarakatan dan Islam politik. Sehingga dari kemunculan ketiga inilah Islam dapat melawan kebijakan-kebijakan pemerintah walau dalam Islam politik umat muslim ditekan mati-matian dan terus tidak pembubaran diancamkan mulai dari ordonansi guru sampai ordonansi sekolah dalam pembasmian sekolah ilegal atau sekolah swasta yang tidak dapat izin pemerintah dari itulah upaya kebijakan kolonial dalam membentuk perlawanan terhadap masyarakat pribumi yang muslim dan mayoritas agama Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Gerakan Islam dalam merespon kebijakan Belanda begitu berkontribusi besar terhadap suksesnya sebuah gerakan terutama dalam bidang pendidikan. Gerakan muslim selalu bergerak dalam pendidikan bukan mengenyampingkan SI yang dikenal dengan gerakan ekonomi akan tetapi SI juga memberi gerakan pendidikan yang ekonom. Maka dari itu setiap gerakan memiliki

visi dan misi masing-masing dalam mempertahankan agama di tengah genangan kolonial baik dari persis, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'. NU sebagai warga mayoritas sampai hari ini memberi kontribusi besar begitu juga Muhammadiyah yang sampai hari ini kontribusinya dapat kita nikmati dan kita analisa. Namun dalam gertakan di tengah implikasi adidaya Belanda gerakan Islam harus bertumpah peluh bahkan darah dalam mempertahankan agama, negara, dan kultur yang ada di Nusantara sehingga Islam tetap pada jalannya walau pernah berperang praktis untuk kepentingan kebenarannya. Perlu digaris bawahi bahwa kolonial terus membatasi gerakan Islam untuk menjaga keadidayaanya terhadap Nusantara tidak kemudian mudah runtuh ada beberapa kebijakan yang mengkang gerakan Islam dari Belanda yaitu: 1. *Cultuurstelsel*, 2. Kebijakan Politik Etis, dan 3. Kebijakan Konservatif.

REFERENSI

- Baso, Ahmad. 2012. *Pesantren Studies 2a: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial*. Jakarta: Pustaka Afid.
- Benda, Harry J. 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Bruinessen, Martin Van. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Daliman. 2018. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Penerbit Ombak.
- Daulay, Haidar Putra. 2001. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2009. *Tradisi Pesantren Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*. Yogyakarta: Pesantren Nausea Press.
- Djumhur, I dan H. Danasuparta. 1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu. Geertz, Clifford. 1971. *Islam Observed Religious Development in Morocco and Indonesia*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Graaf, H.J. de. "Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke-18" dalam Azyumardi Azra (penyunting dan penerjemah). 1989. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan
- Mastuhu, 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Mochtar, H. Affandi. 2009. *Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pesantren*. Bekasi: Pustaka Isfahan.
- Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Nasution, S. 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900- 1942*. Jakarta: LP3ES.
- Sulasman. (2014). *Metode Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.